

EVALUASI PENEMPATAN LOKASI JEMBATAN PENYEBERANGAN
DI KOTA PEKANBARU
(STUDI KASUS IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2009)

Oleh:
Santo Panosoi Panjaitan
(email : santopanjaitan51@yahoo.com)
Pembimbing : Prof. DR. H. Sujianto, M. Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT : Santo Panosoi Panjaitan. 1001112065. Evaluation overpass Location in Pekanbaru (The Case Study is Implementation Local Regulation Number 2 of 2009). Guided by Prof.Dr.H.Sujianto, M.si

Increasingly mobility in Pekanbaru demands facility preparation for pedestrian such an overpass. The purpose is to help pedestrian to cross the road safely and comfortable. Beside that an overcross also can minimize traffic jam and minimize accident over the road. In fact, 11 overcross which spread in Pekanbaru couldn't solve circulation transportation problem because overpass placement location is not appropriate.

The concept of theory is Evaluation. Evaluation consist of effectiveness, efficient, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The genre of this research is qualitative with descriptive method. In data collecting the writer applies interview technique observation and library research. By using ke informan and infrman as information sources.

Based on the result of this research by observation and interview, conclude that overpass placement location in Pekanbaru is not maximal, less for human resources to run the policy, and weak sanction given.

Key Word : Theory Of Evaluation, Overpass

ABSTRAK

Santo Panosoi Panjaitan. 1001112065. Evaluasi Penempatan Lokasi Jembatan Penyeberangan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Implementasi Perda nomor 02 Tahun 2009). Pembimbing Prof. DR. H. Sujianto, M.si

Mobilitas transportasi di kota Pekanbaru yang semakin meningkat menuntut adanya penyediaan fasilitas pejalan kaki seperti jembatan penyeberangan. Tujuan dari pembangunan jembatan penyeberangan ialah membantu pejalan kaki dalam menyeberang jalan dengan mengedepankan keselamatan dan kenyamanan, disamping itu juga jembatan penyeberangan dapat meminimalisir kemacetan lalu lintas dan resiko kecelakaan. Namun dalam kenyataannya 11 jembatan penyeberangan yang tersebar di kota Pekanbaru tersebut dipandang belum mampu memecahkan permasalahan sirkulasi transportasi dikarenakan penempatan lokasinya yang kurang tepat sasaran.

Konsep teori yang peneliti gunakan adalah evaluasi. Evaluasi terdiri dari efektifitas, efisien, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan *key informan* dan *informan* susulan sebagai sumber informasi.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara, dapat diketahui bahwa Pelaksanaan penempatan lokasi jembatan penyeberangan di Kota Pekanbaru belum maksimal. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya kajian-kajian sasaran yang dilakukan, masih kurangnya SDM dalam menjalankan kebijakan, dan masih kurang tegasnya sanksi yang diberikan.

Keyword : Teori Evaluasi, Jembatan Penyeberangan

PENDAHULUAN

Pergerakan pejalan kaki meliputi pergerakan-pergerakan menyusuri jalan, memotong jalan dan persimpangan. Sebagaimana yang lazim terjadi di berbagai kota besar, karena tuntutan perkembangan ekonomi, perdagangan dan kemudahan jangkauan pelayanan bagi masyarakat, maka fasilitas-fasilitas umum seperti hotel, pertokoan dan lain sebagainya biasanya mengelompok pada suatu daerah tertentu. Karena letak gedung satu dengan gedung yang lain menyebar ke seluruh kawasan, maka suatu ketika pejalan kaki harus menyeberangi lalu lintas kendaraan untuk sampai ke tempat tujuan. Namun sering kali keberadaan penyeberang jalan tersebut pada tingkat tertentu akan mengakibatkan konflik yang tajam dengan arus kendaraan yang berakibat pada tundaan lalu lintas dan tingginya tingkat kecelakaan.

Beberapa fasilitas lalu lintas terkhusus bagi pejalan kaki seperti jembatan penyeberangan memang sudah mulai disediakan di beberapa titik di kota Pekanbaru. Penyediaan Jembatan Penyeberangan dimaksudkan untuk mempermudah pejalan kaki dalam menyeberang jalan dengan nyaman dan aman.

Pertimbangan dibangunnya jembatan penyeberangan harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh pemerintah beserta tim. Dalam hal ini adalah Bappeda, Dishubkominfo, beserta investor/ kontraktor. Beberapa pertimbangan yaitu :

1. Dilihat dari pengguna pejalan kaki yang melakukan aktifitas penyeberangan dengan frekuensi tingkat kepadatan yang tinggi. Misalnya pada pasar, sekolah, pusat perbelanjaan dll.
2. Kebutuhan pengendara motor akan rencana kecepatan yang akan dicapai tanpa ada halangan dan aman.
3. Dilihat dari lalu-lintas jalan raya yang sangat padat dan mobilitas tinggi.
4. Kebutuhan keamanan dari penyeberang jalan untuk anak-anak sekolah, karena belum stabil pengontrolan untuk dirinya. Misalnya untuk SD dan taman kanak-kanak.

Secara keseluruhan jembatan yang ada di Kota Pekanbaru merupakan jembatan yang dibangun oleh pihak swasta, dimana dalam prosedurnya Badan Perencana Pembangunan Kota memberikan rekomendasi dan bekerjasama

dengan investor (swasta) untuk mengadakan Jembatan Penyeberangan sekaligus merencanakan penempatan atau titik lokasi Jembatan bersamaan dengan Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru. Dalam proses penempatan lokasi Jembatan Penyeberangan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru berperan dalam mengkaji volume pejalan kaki, kepadatan lalu lintas dan kecepatan rata-rata kendaraan. Hasil kajian tersebut menjadi acuan dalam penempatan lokasi Jembatan Penyeberangan dan selanjutnya direkomendasikan kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru

Anderson dalam Wahab (2004:8) mengatakan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Menurut Anderson konsep kebijakan publik memiliki beberapa implikasi yakni :

- a. Titik perhatian kita membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud/tujuan dan bukan pada perilaku yang serampangan.
- b. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah bukan keputusan sendiri.
- c. Apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan publik dapat dalam bentuk positif dan negatif.

Menurut Dunn dalam Khan(2004:62), dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap penting antara lain: penetapan agenda kebijakan(*agenda setting*), formulasi kebijakan(*policy formulation*), dan penilaian kebijakan(*policy assesment*). Pada tahap penetapan agenda kebijakan, ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu diselesaikan. Hakekat permasalahan ditentukan melalui suatu

prosedur yang seringkali dikenal dengan nama "*problem structuring*". Pada tahap formulasi kebijakan, para analisis mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Untuk itu diperlukan suatu prosedur yang disebut "*forecasting*" dimana konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan.

Menurut Dunn (1998) terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil, yaitu:

1. Effectiveness atau keefektifan

Yaitu yang berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas selalu diukur dari kualitas hasil sebuah kebijakan.

2. Efficiency atau efisiensi

Yaitu yang berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, dan pada akhirnya diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan per-unit kebijakan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

3. Adequacy atau kecukupan

Yaitu yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah atau dengan kata lain apakah tingkat pencapaian hasil tepat menyelesaikan masalah yang dimaksud.

4. Equity atau kesamaan/Pemerataan

Yaitu erat berhubungan dengan risonalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan

usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapat, kesejahteraan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria ini.

5. *Responsiveness* atau ketanggapan

Yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat. Pentingnya kriteria ini adalah karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. *Appropriateness* atau ketepatangunaan

Yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Kriteria ini merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut atau dengan kata lain adalah apakah hasil yang diinginkan benar-benar layak atau berharga.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi *informan* pelengkap dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Perlengkapan Badan Perencana Pembangunan Daerah kota Pekanbaru, Kepala Seksi Keselamatan Transportasi,

Sarana dan Prasarana, masyarakat Pejalan kaki.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah yakni data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan. Dan data sekunder yaitu data yang di peroleh untuk melengkapi data primer yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yakni berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang di temukan di lapangan. Penyajian data dengan deskripsi, hasil wawancara dan observasi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan tentang Penempatan lokasi jembatan penyeberangan di Kota Pekanbaru sangat diperlukan karena bertujuan untuk membantu para pejalan kaki dalam menyeberangan jalan dengan mengutamakan keselamatan serta dapat meminimalisir resiko kecelakaan dan juga mengurangi kemacetan lalu lintas. Setiap organisasi memerlukan adanya suatu kegiatan pelaksanaan karena dengan adanya pelaksanaan kegiatan yang ada dapat di evaluasi.

Penempatan lokasi jembatan penyeberangan ini sendiri sudah berjalan selama lima tahun, namun pada kenyataannya masih banyak jembatan penyeberangan yang belum maksimal penggunaannya karena dipandang kurang mengenai sasaran.

Dengan adanya permasalahan seperti ini perlu adanya dilakukan evaluasi dengan harapan adanya perubahan yang akan menjadi kunci dalam memecahkan masalah tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan evaluasi dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan

menurut William N. Dun dengan hasil sebagai berikut :

1. Efektivitas
Penempatan lokasi jembatan penyeberangan di Kota Pekanbaru belum efektif. Hal ini terlihat masih adanya beberapa jembatan penyeberangan yang belum berfungsi dengan baik.
2. Efisien
Yang dimaksud dengan efisien yaitu tentang seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi efisiensi disini melihat tentang seberapa banyak usaha untuk mencapai hasil, dari di buatnya Kebijakan Tentang Penempatan Lokasi Jembatan Penyeberangan di Kota Pekanbaru. Dalam efisiensi dari sebuah kebijakan dilihat dari berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan itu sendiri
3. Kecukupan
Yang dimaksud dengan kecukupan yaitu tentang seberapa jauh hasil yang telah dicapai dapat memecahkan masalah. Dalam pelaksanaan kebijakan penempatan lokasi jembatan penyeberangan tentunya ada hasil yang dicapai, dari pencapaian hasil tersebut dapat dilihat kecukupan dari pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan jembatan penyeberangan. Responsivitas
4. Kesamaan atau Pemerataan
Pemerataan yaitu apakah distribusi kebijakan atau program serta manfaat dari penempatan lokasi jembatan penyeberangan merata kepada kelompok-kelompok masyarakat. Sejauh mana kebijakan yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat
5. Responsivitas
Respon dari masyarakat sangat beragam ada yang mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang baik karena sangat membantu pejalan kaki, namun ada juga yang mengatakan bahwa

kebijakan ini belum memberikan dampak yang positif sebab masih jauh dari sasaran.

6. Ketepatan
Yang dimaksud dengan ketepatan adalah apakah hasil yang dicapai bermanfaat. Ketepatan yaitu mengenai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Apakah kebijakan yang telah di implementasikan pemerintah adanya antara tujuan dan hasil yang diperoleh benar-benar bernilai atau bermanfaat bagi masyarakat

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan pembuatan sumur resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru:

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di ketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan pembuatan sumur resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia, contohnya kajian-kajian yang dilakukan oleh Dishubkominfo terkhusus seksi keselamatan transportasi, sarana dan prasarana masih belum akurat atau belum tepat untuk beberapa jembatan penyeberangan dari segi penempatannya lokasinya.
2. Kurangnya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dishubkominfo ataupun Bappeda Kota Pekanbaru.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencana Pembangunan Daerah kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta University press.

Tangkilisan 2003, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset

Wahab, Solichin Abdul, 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Keimplementasian Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara

Sujianto 2008, *Implementasi Kebijakan Publik, konsep teori dan praktek, Alaf Riau dan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pasca Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru*

B. DOKUMEN

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.